

Judul : Nuklir diusulkan masuk dalam RUU Energi Baru
Tanggal : Rabu, 23 September 2020
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 19

Nuklir Diusulkan Masuk dalam RUU Energi Baru

Mendapat penolakan dari berbagai pihak.

Vindry Florentin

Vindry.florentin@tempo.co.id

JAKARTA — Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat menampung usul mengenai penggunaan energi nuklir dalam rancangan undang-undang tentang energi baru dan terbarukan (EBT). Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eddy Soeparno menyatakan tenaga nuklir bisa masuk dalam aturan ini karena masuk kategori energi baru. "Energi nuklir belum pernah dimanfaatkan di Indonesia," kata dia, kemarin.

Menurut Eddy, poin

mengenai tenaga nuklir sudah ada dalam naskah RUU EBT. Namun, kata dia, hal ini mendapat pertentangan dari pegiat energi terbarukan. DPR pun akan mengundang lebih banyak pihak terkait untuk menentukan sikap.

Eddy mengungkapkan, dalam sejumlah rapat dengar pendapat, beberapa pihak keberatan energi nuklir diatur dalam RUU EBT. Salah satu alasannya karena tenaga nuklir membutuhkan investasi tinggi, teknologi canggih, serta protokol keamanan yang ketat. "Selain itu, cadangan uranium di Indonesia diperkirakan tidak banyak,"

kata dia. Untuk menanggapinya masukan tersebut, Komisi Energi DPR akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan pelaku di industri tenaga nuklir serta pihak terkait lainnya. Eddy mengaku telah menerima surat penjelasan dari pengembang energi nuklir mengenai pemanfaatan reaktor sebagai sumber energi di sejumlah negara. Mereka juga menjelaskan keunggulan dari energi nuklir.

Eddy menyatakan hasil dari rapat dengar pendapat akan menentukan sikap Komisi terhadap poin mengenai masuknya energi nuklir dalam RUU EBT. Rapat dengar pendapat tersebut akan digelar sebelum masa persidangan I tahun ini yang berakhir pada 9 Oktober mendatang. Komisi Energi DPR menar-

getkan RUU EBT sudah bisa diserahkan ke Badan Musyawarah DPR pada akhir tahun ini untuk kemudian dibahas dengan pemerintah pada 2021.

Tentangan terhadap poin nuklir salah satunya datang dari Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI). Ketua Umum METI Surya Darma menyatakan pengaturan nuklir akan menghilangkan fokus RUU EBT. "RUU ini dari awal digagas untuk mendorong pemanfaatan energi terbarukan, seharusnya fokus membahas soal apa saja yang dibutuhkan oleh energi terbarukan agar dia bisa berkembang," ujarnya.

Surya menyatakan masih banyak pekerjaan yang perlu diselesaikan untuk mengembangkan energi terbarukan. Salah satunya mengatur agar pembiayaan



Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, Sugeng Suparwoto memimpin rapat dengar pendapat umum Komisi VII DPR perihal RUU EBT di gedung Parlemen, Senayan, Senin lalu.

proyek dapat lebih murah sehingga bisa menarik bagi investor. Selain itu, pengusaha meminta adanya perubahan aturan mengenai harga listrik dari energi terbarukan yang dinilai masih belum layak.

Senada dengan Surya, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Energi Terbarukan dan Lingkungan Hidup Halim Kalla tak setuju terhadap pengaturan nuklir dalam

RUU EBT. Dia menyoroti energi nuklir yang telah memiliki aturan sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. UU tersebut mengatur pemanfaatan, pengembangan, hingga pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir. "Nuklir sifatnya *high technology* dan *security*-nya lebih tinggi. Jadi, UU keselamatannya lebih terfokus," ujar dia. ●